



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)
KOTA BATAM TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2020 selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Batam sebagai bukti akuntabilitas vertikal. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, dan kami sangat menghargai segala kritik dan saran yang konstruktif demi untuk perbaikan LKjIP ini. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batam, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



Umiyati, S.E
NIP. 19621027 198503 2 006

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|---------------------|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | | i |
| DAFTAR ISI | | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Dasar Hukum | 1 |
| | C. Data Umum Organisasi | 3 |
| | D. Sistematika Penyajian | 10 |
| BAB II | PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA | 11 |
| | A. Rencana Strategis | 11 |
| | B. Tujuan dan Sasaran | 12 |
| | C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran | 14 |
| | D. Rencana Kinerja | 15 |
| BAB III | CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 18 |
| | A. Capaian Kinerja | 18 |
| | B. Akuntabilitas Keuangan | 32 |
| BAB IV | PENUTUP | 38 |
| LAMPIRAN | | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performance result*) selama tahun anggaran 2021.

Pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar **Rp 14.763.970.970,-** dengan dana yang terserap sebesar **Rp 12.387.067.180,-** sampai dengan bulan Desember dengan persentase serapan anggaran sebesar 84 %.

Pelaksanaan program sepanjang tahun 2021 secara umum masih terdampak kondisi pandemi covid-19 terkait pembatasan kegiatan kemasyarakatan pada periode tertentu (PPKM) tingkat nasional maupun tingkat kota Batam. Tentunya hal ini berkorelasi langsung terhadap program yang bersentuhan dengan masyarakat luas sehingga implikasinya dirasakan pada capaian indikator tahun 2021.

Hasil capaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah mencapai beberapa sasaran strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. Untuk target indikator kinerja IPG dan IDG masing-masing 94,54% dan 61.50% dengan capaian IPG 94,43%, dan IDG 59,10%. Untuk target indikator kinerja Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan 100%, dengan capaian 100%. Untuk target indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) 74%, capaian target 78.70%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kota Batam, berlangsung dengan mengacu pada perencanaan (jangka menengah) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam dan selanjutnya dijabarkan dalam Renstra setiap unit organisasi. RPJMD dan Renstra unit organisasi memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu menengah (lima tahunan).

Sebagai salah satu bentuk perwujudan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, serta sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Gubernur dan Bupati/Walikota wajib untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

DP3APPKB Kota Batam menyusun LKJIP 2020 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan. Penyusunan didasarkan pada pencapaian sasaran dan kinerja setiap kegiatan yang berlangsung selama Tahun 2021, dan selanjutnya laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan kegiatan tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKJIP ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 jo. Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah

C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dengan dasar pembentukan SOTK ini adalah;

- PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada BAB V Tentang Besar Organisasi dan Perumpunan Perangkat Daerah, dan pada Bagian tiga tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan (pada pasal 22).
- Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Peraturan Walikota Batam No. 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengemban tugas dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara sinergi berkesinambungan.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Sesuai Peraturan Walikota tersebut kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam No. 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, selain tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

1. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan dan Budaya;
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawahi :

1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Anak; dan
3. Seksi Data Informasi Perempuan dan Anak.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
3. Seksi Pendistribusian Kebutuhan Alat Obat Kontrasepsi.

g. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :

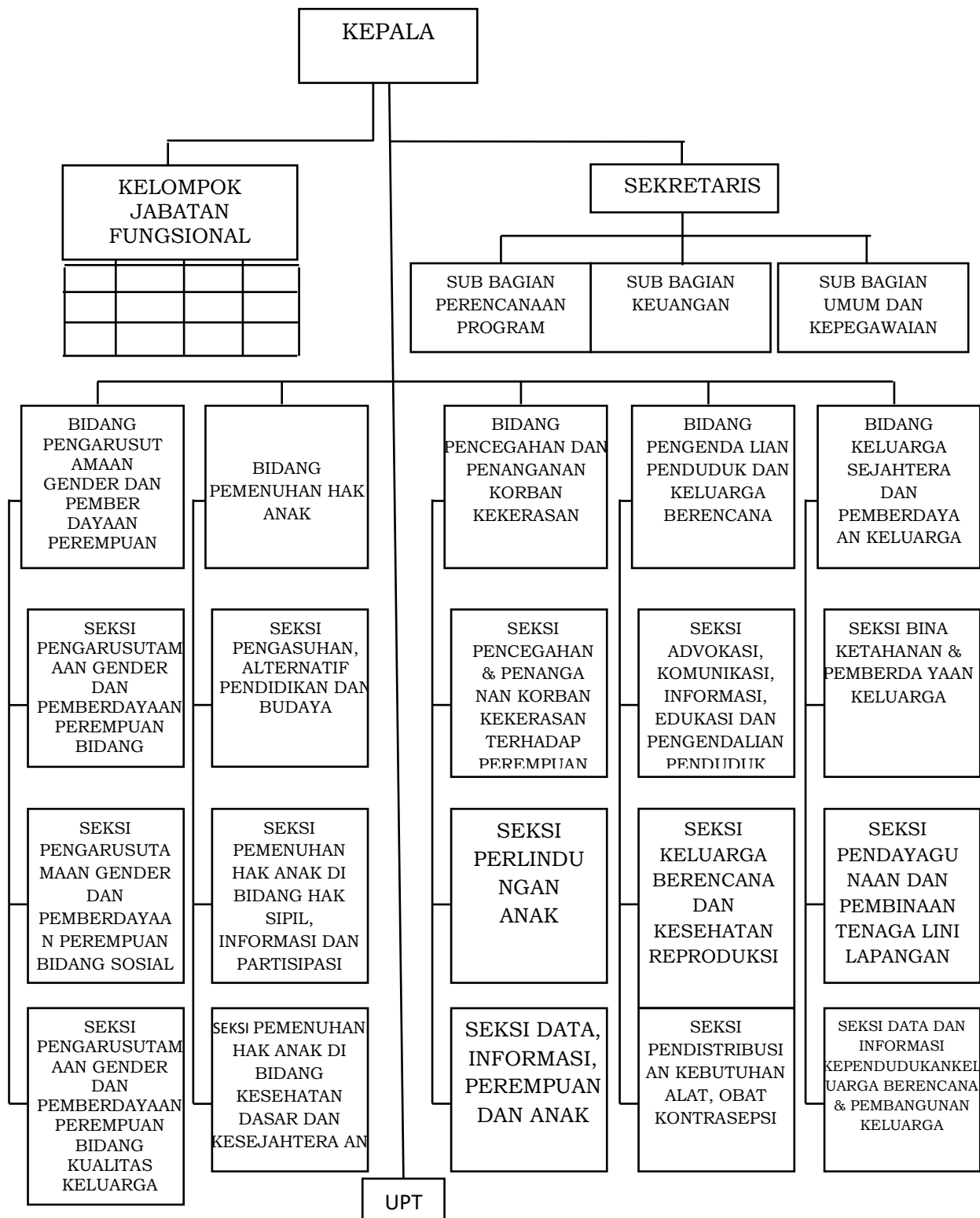
1. Seksi Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;

2. Seksi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan;
3. Seksi Data dan Informasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM**



3. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai upaya dalam meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara terus menerus dan berkesinambungan maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis didalam urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kota Batam, yang didalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek strategis organisasi antara lain berkenaan dengan tugas dan fungsi organisasi sehingga dipandang perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan berwawasan nasional secara optimal dan memadai,
- 2) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- 3) Pemerataan dan peningkatan Pelayanan dibidang Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi baik berupa pengadaan Alat Kontrasepsi maupun penyediaan petugas layanan.
- 4) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian Keluarga Sejahtera melalui pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana, maka kedudukan dan peran perempuan perlu mendapat perhatian khusus serta perlu ditingkatkan secara terus menerus, sehingga kedepan terutama untuk tingkat Kabupaten/Kota perempuan menjadi salah satu unsur terpenting dalam keluarga Yang memegang kunci utama keberhasilan pembangunan pada umumnya.

Kemudian yang berikutnya adalah masih adanya kaum perempuan yang latar belakang pendidikannya belum memadai sehingga sangat diperlukan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyadaran gender dimasyarakat tentunya melalui program yang berorientasi pada peran, aspirasi, keutuhan dan permasalahan perempuan secara komprehensif.

4. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam didukung oleh personel/ SDM sebanyak 48 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Menurut Golongan

| No | Uraian | Menurut Golongan | | | | Jumlah |
|--------|------------|------------------|----|-----|----|--------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1. | Struktural | - | - | 20 | 3 | 23 |
| 2. | Fungsional | - | - | - | - | - |
| 3. | Staf | - | 3 | 7 | - | 10 |
| 4. | Arsiparis | - | - | - | - | - |
| 5. | THD | - | - | - | - | |
| 6. | THL | - | - | - | - | 13 |
| Jumlah | | - | 3 | 27 | 3 | |
| Jumlah | | | | | | 46 |

Tabel 1.2 Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Uraian | Menurut Pendidikan | | | | | Jumlah |
|--------|------------|--------------------|------|----|----|----|--------|
| | | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | |
| 1. | Struktural | - | 1 | - | 21 | 1 | 23 |
| 2. | Fungsional | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Staf | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 4. | Arsiparis | - | - | - | - | - | - |
| 5. | THD | - | - | - | - | - | |
| 6. | THL | - | 3 | 2 | 8 | - | 13 |
| Jumlah | | - | 9 | 4 | 32 | 2 | 46 |

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan menguraikan tentang: Data Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, dan Sistematika Penyajian
- Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menguraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- Bab 3 Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang: Pengukuran Kinerja; Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; serta Akuntabilitas Keuangan.
- Bab 4 Penutup menguraikan tentang tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen perangkat pemerintahan pada DP3APPKB Kota Batam, yang menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama DP3APPKB beserta seluruh karyawan dan staf untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan DP3APPKB Kota Batam yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat khususnya selaku aparat terdepan dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintahan di Kota Batam.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dimulai dengan penetapan visi dan misi yang tidak terlepas dari visi dan misi Kota Batam. Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, atisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 , **Visi Kota Batam** adalah ***Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.***

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Visi :

“Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan pernyataan misi sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Dinas P3APPKB Kota Batam Batam sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
2. Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key performance factors*) yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Tujuan

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance indicator*) tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 1 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah
- Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak
- Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana
- Meningkatkan Keberdayaan keluarga.

2. Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional, Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu satu tahun, guna mencapai tujuan jangka menengah yang telah dirumuskan untuk lima tahun ke depan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara periodik baik secara tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai.

Adapun sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : *Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).* Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pengarusutamaan gender; mengoptimalkan peran kelembagaan Pokja PUG dan focal point perangkat daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender; mengoptimalkan organisasi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
2. Misi 2 : *Melakukan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.* Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan, Meningkatnya capaian Kota Layak Anak.
3. Misi 3 : *Peningkatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).* Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE, optimalisasi peranan kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Ber-KB, Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga, UPPKS dan PIK-R.

C. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1) Kebijakan

Kebijakan dalam hal ini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan ataupun tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi kebijakan-

kebijakan yang ditetapkan Walikota Batam dan berbagai kebijakan internal lainnya yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG; Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang
- Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian kota layak anak
- Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
- Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2) Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
2. Program Peningkatan Kualitas keluarga
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

D. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut, mencakup periode tahunan dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam proses rencana kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan

Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Penjabaran dari seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini kemudian diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

1) Proses Penyusunan Rencana Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di Tahun 2021. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS), diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

d) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2) Perjanjian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94.54% |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 61.50 % |
| | | Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan | 100 % |
| 2. | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) | 74.0 % |

BAB III

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target yang tertuang dalam indikator kinerja utama Dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban Kinerja Instansi setiap tahunnya. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga
2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Pelaksanaan program di tahun 2021 masih terpengaruh dengan kondisi pandemic covid-19 yang berlangsung sampai saat ini namun secara umum masih dapat terlaksana dengan baik dan mempedomani kaidah/aturan yang berlaku di masa pandemi. Perubahan dan perbaikan telah berjalan dalam setiap sektor pembangunan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan penerapan protocol Kesehatan baik melalui pemenuhan standard protocol kesehatan dan melalui vaksinasi covid-19 yang menjadi stimulus dasar penggerak perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dan optimis terhadap pembaharuan pasca pandemic Covid-19. Kebijakan pelaksanaan program pembangunan pada masa pandemi ini berpedoman kepada peraturan yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Untuk Penanggulangan Covid-19. Secara persentase anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terealisasi sebesar 84 % dari total anggaran sebesar Rp. 14.763.970.970.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga diwujudkan melalui Program :

1. Program Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
3. Peningkatan Kualitas keluarga
4. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Pemenuhan Hak Anak
6. Perlindungan Perempuan
7. Perlindungan Khusus Anak

Dan Sasaran Strategis Terkendalanya Pertumbuhan Penduduk di wujudkan melalui Program :

1. Pembinaan Keluarga Berencana
2. Pengendalian Penduduk
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Sesuai dengan Indikator perjanjian kinerja Tahun 2021 program tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Berikut capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam Tahun 2021

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2021 | | | KATEGORI |
|----|--|---|---------|-----------|---------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94.54% | 94.43% | 99,88% | SANGAT TINGGI |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 61.50 % | 59.10% | 96,09% | SANGAT TINGGI |
| | | Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan | 100% | 100% | 100% | SANGAT TINGGI |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|-----|--------|---------|---------------|
| 2. | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) | 74% | 78.70% | 106,35% | SANGAT TINGGI |
|----|------------------------------------|---|-----|--------|---------|---------------|

Tabel 3.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2020 | | | 2021 | | |
|----|--|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94,53% | 94,42% | 99,87% | 94,54% | 94,43% | 99,88% |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 59,50% | 58,40% | 98,15% | 61,50% | 59,10% | 96,09% |
| | | Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) | 73,50% | 84,02% | 114,31% | 74% | 78.70% | 106,35% |

Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu program prioritas Dinas pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan sasaran pencapaian Indeks pembangunan Gender yang secara umum memuat kegiatan berbasis kemasyarakatan. Pada masa ini mengalami pergeseran besar akibat pemberlakuan sejumlah aturan protocol Covid-19 dan pemberlakuan masa PPKM darurat untuk pencegahan penyebaran penyakit covid-19. Namun dengan upaya dan kerja keras tim pada akhir triwulan I (pertama) program ini dapat dilaksanakan melalui berbagai pelatihan peningkatan kompetensi dan SDM kaum perempuan.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam mendukung terlaksananya pembangunan kota Batam dari berbagai sektor kehidupan. Gambaran secara umum saat ini masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup

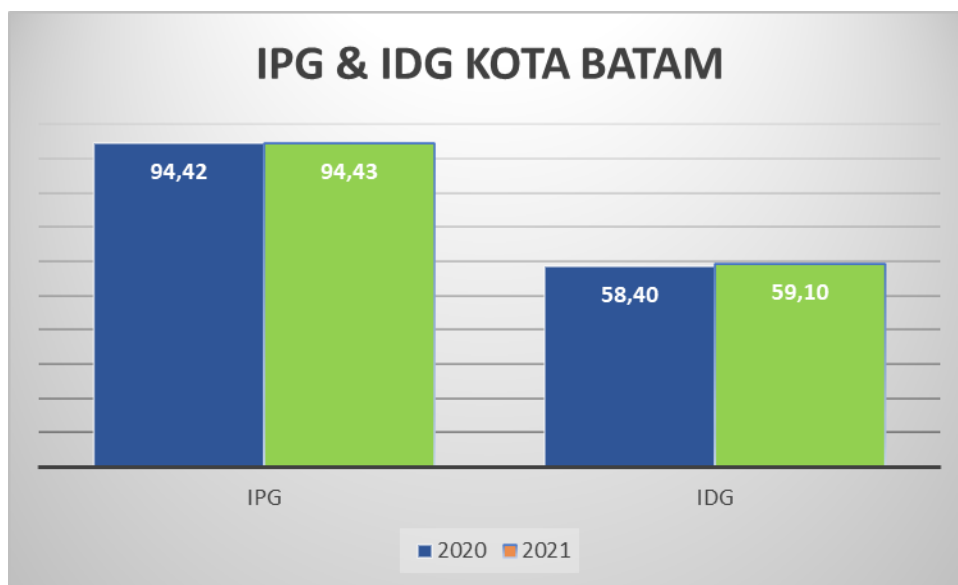
yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Batam. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Batam melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali potensi diri perempuan kota Batam untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan.

Pada tahun 2021, 500 orang perempuan turut aktif dalam Peringatan HKK PKK Kota Batam yang disejalankan dengan Kegiatan Halal Bi Halal, 5000 orang hadir dalam Pembinaan Akhlak Mulia. Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM perempuan kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan kota Batam tahun 2021 diadakan pelatihan tata rias bagi 550 orang ibu rumah tangga se-kota dan pelatihan tata boga bagi 220 orang, pelatihan pengembangan SDM perempuan 370 orang Batam, seminar talkshow kesehatan wanita dan demo kecantikan bagi 170 orang yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan kaum perempuan.

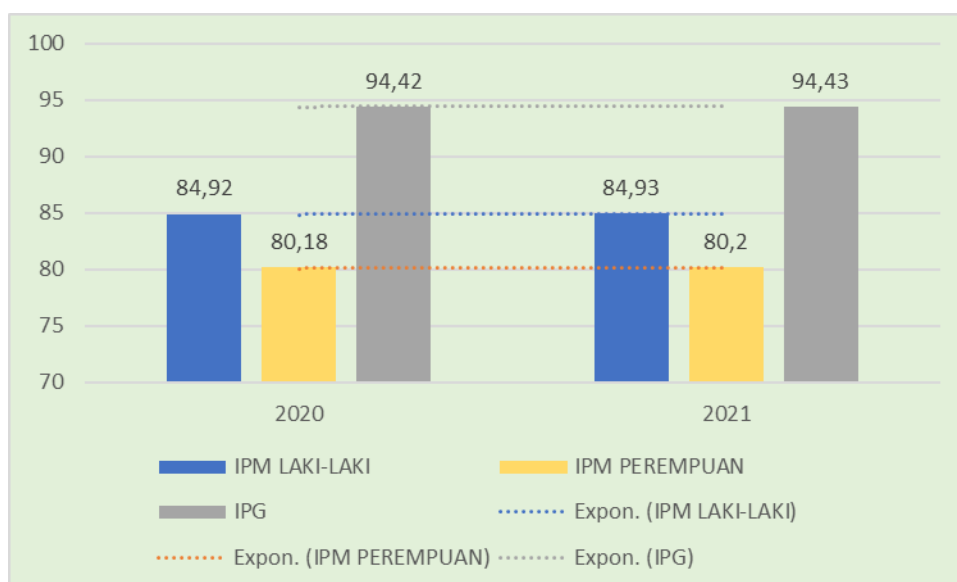
Pada tahun 2021 Peningkatan Peran Serta Stakeholder dalam Kelembagaan PUG telah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam tetap melakukan upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender melalui koordinasi melalui pelatihan PPRG bagi 50 orang perencana dan staf OPD se-kota Batam. Representasi program ini dicapai melalui pencapaian anggaran yang berbasis gender yang pada tahun 2021 Anggaran Responsif Gender kota Batam mencapai angka 22.71 % dari total belanja langsung APBD sebesar Rp. 2.968.574.058.069. Secara umum alokasi ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11.30 %. Sehingga diharapkan program pembangunan kota Batam tetap berporos kepada GAB/GBS sehingga terwujud tata kelola pembangunan yang berporos gender. Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender kota Batam. Pada tahun 2021 tetap dilakukan pemanfaatan Sistem Aplikasi SIPUGA yang mengacu kepada system GAB/GBS yang diharapkan dapat menjadi basis data pelaksanaan gender di Kota Batam. Dan ketersediaan data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat.

Melalui program inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Perempuan, dan Indeks Pemberdayaan Gender di kota Batam yang berkorelasi dengan pencapaian IPM Kota Batam secara umumnya. Keberhasilan dalam pencapaian ini tentunya melibatkan semua sektor dan unsur-unsur lainnya yang prior dalam usaha pembangunan kota Batam baik dalam level pemerintahan maupun komponen swasta lainnya. Secara umum, dalam mewujudkan kualitas hidup dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam telah dilakukan berbagai langkah progresif yang memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam melangsungkan kehidupan berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial.

Menjelaskan kondisi ini sebagai berikut capaian IPG dan IDG Kota Batam Tahun 2021 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya :



Data Sumber : BPS Kota Batam



Data Sumber: BPS Kota Batam

Melalui grafik di atas dapat dijelaskan pencapaian IPG Kota Batam sebesar 94.43 yang meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 94.42. Pada tahun 2021 IPM Laki-laki sebesar 84.93 dan IPM Perempuan sebesar 80.20. Sedangkan pada tahun 2020 IPM Laki-laki 84.92 dan IPM perempuan sebesar 80.18. Ada peningkatan IPM perempuan sebesar 0.02 dari tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya akselerasi percepatan pembangunan perempuan yang mengikuti percepatan capaian pembangunan laki-laki.

Sebagai berikut komponen IPG Kota Batam Tahun 2020 dan 2021 :

| KOTA BATAM | UHH | | EYS | | MYS | | PENGELUARAN PERKAPITA | | IPM | | IPG |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 2020 | 71.34 | 75.13 | 13.04 | 13.17 | 11.32 | 10.96 | 26.536 | 17.398 | 84.92 | 80.18 | 94.42 |
| 2021 | 71.38 | 75.17 | 13.05 | 13.18 | 11.33 | 10.97 | 26.443 | 17.361 | 84.93 | 80.20 | 94.43 |

Dari masing-masing komponen, perempuan masih lebih lambat peningkatannya di rata-rata lama sekolah sebesar 10.97 dan pengeluaran perkapita disesuaikan yang hanya sebesar 17.361 dan masih sangat jauh jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 26.443. Perempuan hanya unggul di umur harapan hidup sebesar 75.17 dibanding laki-laki sebesar 71.38 dan harapan lama sekolah unggul hanya sebesar 0.13 di angka 13.18 dibanding laki-laki 13.0. Namun secara umum, IPG Kota Batam tercapai diatas *IPG Nasional yang sebesar 91.06*.

IDG Kota Batam pada tahun 2021 sebesar 59.10 capaian ini terlihat meningkat sebesar 0.70 point dari tahun sebelumnya IDG sebesar 58.40. Sebagai berikut komponen IDG Kota Batam tahun 2021 :

| TAHUN | Keterlibatan dalam Parlemen | Perempuan sebagai Tenaga Profesional | Sumbangan Pendapatan Perempuan |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 2020 | 8.00 | 41.40 | 29.31 |
| 2021 | 8.00 | 44.54 | 29.50 |

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan IDG Kota Batam yang menunjukkan peningkatan peran serta kaum perempuan dalam sektor-sektor pembangunan dan bidang usaha. Terlihat melalui tabel di atas di 3 komponen IDG mengalami peningkatan dan khususnya pada perempuan sebagai tenaga profesional meningkat sebesar 3.14 point di angka 44.54. Kondisi ini menunjukkan ada akselerasi dan kontribusi positif kaum perempuan dalam progress usaha pembangunan kota Batam melalui tenaga profesional dalam sector pekerja. Demikian halnya sumbangan pendapatan perempuan kota Batam pada tahun 2021 meningkat sebesar 0.19 dibandingkan tahun sebelumnya. Seterusnya diharapkan indikator ini sebagai sinyalmen yang positif dan berkelanjutan sehingga kaum perempuan tidak lagi menjadi kaum yang tebelakang tetapi turut andil dalam bagian yang besar dalam upaya pembangunan kota Batam secara umumnya. Melalui pencapaian ini perempuan harus lebih aktif lagi menggali kapasitas dan potensi diri dengan mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengimbangi akselerasi laki-laki di dalam lapangan pekerjaan. Dalam hal keterwakilan di parlemen perempuan pun masih menunjukkan capaian yang belum maksimal. Demikian halnya dengan sumbangan pendapatan perempuan masih terlihat adanya diskriminasi dimana sumbangan pendapatan perempuan masih di bawah angka rata-rata sumbangan pendapatan laki-laki.

Dengan pencapaian ini, secara umum melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak sasaran strategis yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan kualitas keluarga telah terlaksana dengan baik dengan IPG sebesar **94.43** dan IDG sebesar **59.10**.

Jika dibandingkan dengan target Nasional secara umum pencapaian indikator IPG kota Batam masih diatas standard dan akselerasi pembangunan gender dapat menyesuaikan dengan target yang diharapkan. Namun pada capaian indeks Pemberdayaan Gender masih perlu usaha dan perbaikan yang signifikan karena masih mencapai 59.10. dibandingkan perolehan tingkat nasional sebesar 75.57. Demikian halnya dengan capaian CPR Kota Batam pada tahun 2021 sebesar 78.70 masih jauh di atas standard capaian nasional pada angka 54.97. Berikut perbandingan capaian indikator dengan target Nasional Tahun 2021.

Tabel 1.1.3. Tabel Perbandingan Capaian dengan Standard Nasional

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2021 | | | STANDARD NASIONAL | Persentase Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|---------|-------------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94.54 | 94.43 | 99,88% | 91,06 | 103,70% |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 61.50 | 59.10 | 96,09% | 75,57 | 78,20% |
| | | Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% |
| 2. | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) | 74 | 78.70 | 106,35% | 54,97 | 143,16% |

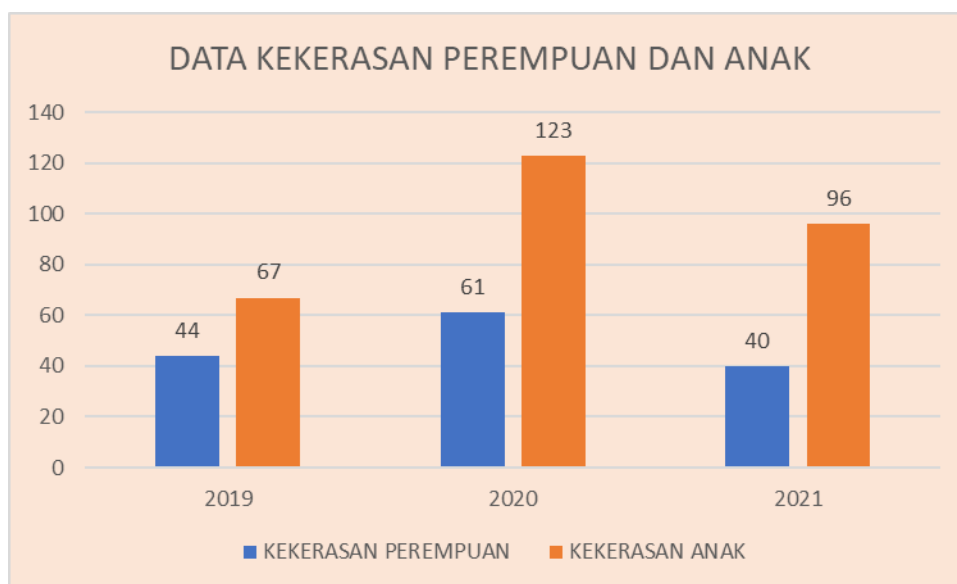
Batam sebagai pusat industri dan wisata tampaknya menjadi daya tarik yang memikat setiap orang untuk mencoba hidup di kota Batam hal ini tentunya memicu tingginya mobilisasi penduduk yang masuk ke Kota Batam yang secara umum menciptakan masalah social yang kompleks dewasa ini. Banyaknya pencari pekerjaan perempuan yang datang yang tidak diimbangi dengan skill yang memadai maupun ketersediaan lapangan pekerjaan menciptakan tingginya angka pengangguran di kota Batam. Secara psikologis hal ini mengakibatkan tingkat stress kehidupan yang tinggi, karena banyaknya pasangan muda yang

menikah, sulitnya memperoleh memperoleh sumber penghidupan akibat keterbatasan lapangan pekerjaan sementara harus membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Akibatnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan.

Di sisi lain Batam sebagai border line dan tujuan transit ke luar negeri mengakibatkan seringnya terjadi tindak perdagangan orang ataupun trafiking, yang pada umumnya dialami oleh perempuan. Seringkali korban dijanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan gaji yang tinggi melalui akses keluar kota Batam. Namun ternyata hanyalah sebuah kedok yang berujung pada perdagangan orang dan dipekerjakan sebagai penjaja seks komersil. Fenomena ini bukan lah sesuatu yang langka di kota Batam.

Dalam hal inipun Dinas Pemberdayaan Perempuan telah berupaya semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan jejaring Tindak perdagangan orang maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kota Batam, diantaranya adalah: Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Kepri, Yayasan Embun Pelangi, Rumah Faye, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Gerhana, Yayasan Lintas Nusa, LIBAK, Gembala Baik dan stakeholder terkait lainnya baik vertical maupun horizontal.

Sebagai berikut gambaran Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kota Batam dalam kurun tiga tahun terakhir :



Melalui grafik di atas di gambarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Batam dalam kurun 3 tahun terakhir angkanya fluktuatif namun menurun pada tahun 2021. Dari tahun 2019 dan 2020 antara jumlah kekerasan perempuan dan anak frekuensinya relative

meningkat. Memang dibanding kekerasan terhadap perempuan, tingkat kekerasan terhadap anak angkanya masih lebih tinggi. Tetapi pada tahun 2021 angka ini terlihat menurun baik kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Pada tahun 2021 ada penurunan 9% angka kekerasan terhadap perempuan di bandingkan tahun 2020. Demikian halnya kekerasan terhadap anak menurun sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Data ini sesuai dengan yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Pada masa ini masalah pada anak adalah masalah yang cukup serius dan kompleks. Keterbukaan akses dan informasi teknologi melalui internet kerap memicu terjadinya aksi kekerasan dan perilaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur terutama di masa pandemic. Waktu pembelajaran yang 80% dilaksanakan melalui daring/online memicu kesempatan terjadinya aksi kekerasan seksual karena cenderung pelaku kejahatan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah kandung, kerabat yang tinggal di rumah dan tetangga sekitar. Pada tahun 2021 dari 96 orang anak yang mengalami kekerasan 59 orang diantaranya mengalami kekerasan seksual. Kondisi ini sangat memprihatinkan tentunya bagi kelangsungan generasi penerus bangsa Indonesia. Disamping itu dapat dijelaskan bahwa psikologis hidup keluarga yang rapuh dan tidak kuat dalam fondasi nilai moral dan sosial memicu kecenderungan perempuan dan anak mengalami kekerasan.

Sepanjang tahun 2021 sebanyak 136 orang perempuan dan anak yang mengalami kekerasan mencakupi 40 orang kekerasan terhadap perempuan per total perempuan 586.997 dan 96 orang kekerasan terhadap anak per total anak kota Batam saat ini sebesar 425.404. Pada tahun ini terlihat angka kekerasan menurun dibandingkan angka pada tahun lalu yang meliputi 184 orang terdiri dari 61 orang perempuan dan 123 orang anak. Berturut-turut dari kondisi 3 tahun terakhir, tahun 2020 adalah angka yang paling tinggi. Hal ini di latarbelakangi oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial masyarakat kota Batam yang dilatarbelakangi tuntutan hidup secara ekonomi dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di tahun 2021 ini yang sangat terbatas jumlahnya. Dan meningkatnya peluang/kesempatan melakukan aksi pelecehan di masa pandemic selama pembelajaran online/daring. Anak mengalami kerentanan yang lebih tinggi mengalami kekerasan baik kekerasan ekonomi maupun psikologis terutama seksual. Dapat dikatakan ini adalah dampak psikologis kondisi pandemic covid-19 yang kita alami mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini yang secara umum merombak berbagai tatanan dan sektor kehidupan baik dalam dunia usaha, pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat.

Pada umumnya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual yang meninggalkan trauma psikologis berkepanjangan. Menyikapi keadaan ini Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam gencar melakukan sosialisasi Perda Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak di tingkat kecamatan maupun kelurahan Kota Batam. Maka dengan aktif mensosialisasikan perda tersebut diharapkan perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik. Disamping itu untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dilaksanakan pembentukan Satgas Anti kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dibentuk pada 2 pos yaitu Kelurahan Mangsang dan kelurahan Tanjung Riau. Satgas ini memberdayakan masyarakat agar aktif memantau dan mengawasi kondisi sekitar terkait perkembangan dan perlindungan anak di kota Batam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 s.d. tahun 2021 telah terbentuk 18 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak 12 Kecamatan sebanyak 44 Forum Anak tingkat kelurahan se kota Batam dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak di kota Batam yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 2 kecamatan Belakang padang dan Bulang. Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan klinik laktase di tempat-tempat umum (Mall, bandara, perkantoran, dll). Demikian halnya keberadaan KPPAD Kota Batam yang turut mengambil bagian besar dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak secara umum di kota Batam.

Dengan demikian pada tahun 2021 telah dilakukan upaya yang sangat baik dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak baik dalam penanganan terhadap korban maupun pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan anak diterima total 136 orang melalui pengaduan dan kunjungan baik melalui Dinas P3A P2 & KB, P2TP2A dan KPPAD Kota Batam. Adapun mekanisme pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 & KB Kota Batam maupun P2TP2A Kota Batam tersebut melalui;

1. Pengaduan / Identifikasi
2. Investigasi
3. Konseling dan Pendampingan korban; Psikologi dan Hukum
4. Penanganan di shelter (Rumah Singgah)
5. Reintegrasi Sosial

Maka pada tahun 2021, target indikator Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan telah tercapai 100 %. Dalam hal ketercapaian partisipasi aktif perempuan dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak ini, maka kualitas ketahanan keluarga di Kota Batam meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Jumlah Penduduk kota Batam dari tahun ke tahun umumnya mengalami peningkatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya daya tarik dalam lapangan pekerjaan di Kota Batam yang memberikan stimulus bagi kaum pencari kerja untuk masuk ke Kota Batam. Umumnya penduduk yang masuk ke kota Batam adalah usia produktif antara 18 s.d. 40 tahun. Namun pada tahun 2021 arus pendatang cenderung menurun yang dilatarbelakangi oleh kondisi pandemic covid-19. Berlakunya masa PPKM beberapa periode di sepanjang tahun 2021 berimbas kepada penurunan populasi penduduk kota Batam. Pada tahun 2021 populasi kota Batam berjumlah 1.169.648 menurun jumlahnya dari tahun 2020 sebanyak 1.329.773. Kondisi ini menggambarkan dampak pandemic Covid-19 dimana arus masuk penduduk melalui pencari pekerjaan ke kota Batam yang terbatas selama masa pandemic. Demikian halnya kondisi sosial dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit mengurangi minat pencari pekerjaan datang ke Batam sepanjang tahun 2021. Penduduk kota Batam umumnya didominasi oleh usia produktif yang beresiko tinggi terhadap tingginya angka kelahiran di kota Batam. Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan program pelayanan KB gratis dengan sasaran Pasangan Usia Subur yang pada akhirnya diharapkan pada target pencapaian Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR).

CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Batam Tahun 2021 sebanyak 233.636 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam pada tahun 2021 sebanyak 183.878 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) x 100. Pada tahun 2021 capaian dari indikator ini sebesar **78.70 %** dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74 %. Memang terlihat ada penurunan yang cukup signifikan dibanding pencapaian tahun 2020 sebesar **84.02 %**.

Hal ini berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kontrasepsi alami pada masa pandemic yang dikarenakan psikologis masyarakat yang enggan melakukan tindakan klinis kesehatan dan cenderung takut berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan untuk memasang alat kontrasepsi. Faktor lainnya kondisi pandemic mendorong

meningkatnya jumlah masyarakat yang pulang ke kampung halamannya dan tidak kembali lagi ke Batam akibat PHK dan kehilangan pekerjaan di masa pandemic mengakibatkan turunnya persentase pengguna kontrasepsi di Kota Batam.

Pencapaian CPR (contraceptive prevalence rate) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Pada tahun 2021 sekalipun dalam masa pandemic covid-19 tetap dilakukan upaya dan layanan KB secara maksimal baik di klinik layanan pemerintah maupun swasta yang tentunya pelayanan KB pada masa pandemic ini menerapkan sejumlah aturan protocol kesehatan yang sangat ketat sesuai maklumat pencegahan penyebaran covid-19 di kota Batam. Penyuluhan KB diperkuat dengan basis layanan informasi online yang terintegrasi dengan WEBEX BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sehingga informasi mengenai program pembangunan kependudukan dan KB tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat kota Batam.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting dalam melahirkan tunas generasi yang unggul dalam hal ini dilakukan melalui penyerahan Modem Aplikasi Bangsa Kencana kepada Petugas Lapangan KB kota Batam sebagai basis dan panduan informasi pembangunan keluarga sejahtera.

Pada tahun 2021 telah didistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 260 klinik KB baik pemerintah maupun swasta. Demikian halnya penyediaan sarana dan prasarana layanan KB yang terlaksana 100 % di tahun 2021 melalui pengadaan Obgyn bed, Implant dan IUD removal Kit total sebanyak 95 set yang disalurkan ke 38 orang bidan prkatek mandiri dan klinik KB pemerintah maupun swasta. Peningkatan sarana prasarana Balai Penyuluhan KB di 12 kecamatan dilaksanakan melalui penyaluran mebelair, layar proyektor, Personal kompputer, Laptop, Printer, Modem Infocus yang turut meningkatkan kualitas layanan KB di kota Batam.

Demikian halnya penggerakan kampung KB dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan masyarakat tentang konsep dan tatanan nilai pelaksanaan program KB di kota Batam. Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh

kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Pada tahun 2021 juga dilaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) melalui Bakti Sosial Pelayanan KB gratis di 3 (tiga) kecamatan dan pelayanan KB serentak dalam peringatan hari Kontrasepsi Nasional yang berkontribusi besar dalam pencapaian persentase pemakai kontrasepsi (CPR) sebesar 78.70. Demikian halnya metode layanan KB di masa pandemic covid-19 dilakukan dengan sistem Bidan Rujukan yang aktif melayani masyarakat untuk melaksanakan program KB di 12 kecamatan kota Batam.

Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan program KB ini, maka ketercapaian Contraceptive Prevalence rate di kota Batam Tahun 2021 sebesar 78.70% dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tahun 2021. Dengan kata lain capaian indikator ini terintegrasi dari keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam. Sebagai berikut Pencapaian Peserta KB aktif pada tahun 2021:

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN SE KOTA BATAM

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PUS | CAPAIAN IKP PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI | | | | | | | TOTAL KB AKTIF / CPR |
|----|-----------------|------------|--|------|-----|---------|--------|--------|------|----------------------|
| | | | IUD | MOW | MOP | IMPLANT | KONDOM | SUNTIK | PIL | |
| 1 | BELAKANG PADANG | 5379 | 92 | 39 | 9 | 112 | 40 | 1550 | 447 | 2.289 |
| 2 | BATU AMPAR | 10932 | 266 | 156 | 85 | 605 | 997 | 3945 | 2285 | 8.339 |
| 3 | SEKUPANG | 34840 | 1124 | 963 | 133 | 1709 | 1808 | 11393 | 7535 | 24.665 |
| 4 | NONGSA | 10153 | 296 | 104 | 26 | 208 | 398 | 2627 | 1452 | 5.111 |
| 5 | BULANG | 2241 | 85 | 75 | 0 | 148 | 49 | 699 | 607 | 1.663 |
| 6 | LUBUK BAJA | 22788 | 3848 | 1118 | 83 | 1178 | 1738 | 7223 | 5090 | 20.278 |
| 7 | SEI BEDUK | 22019 | 950 | 265 | 118 | 1462 | 2097 | 2670 | 5119 | 12.681 |
| 8 | GALANG | 2803 | 43 | 17 | 0 | 395 | 120 | 895 | 791 | 2.261 |
| 9 | BENGGONG | 20430 | 2824 | 446 | 86 | 777 | 1175 | 6104 | 5551 | 16.963 |
| 10 | BATAM KOTA | 30841 | 2850 | 607 | 114 | 4458 | 1524 | 10290 | 8043 | 27.886 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 11 | SAGULUNG | 43900 | 9993 | 851 | 133 | 1620 | 1355 | 12863 | 10945 | 37.760 |
| 12 | BATU AJI | 27310 | 1822 | 1269 | 172 | 4110 | 1160 | 10175 | 5274 | 23.982 |
| JUMLAH PUS | | 233.636 | 24193 | 5910 | 959 | 16782 | 12461 | 70434 | 53139 | 183.878 |

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan laporan akuntabilitas keuangan pelaksanaan program tahun 2021 juga telah terlaksana dengan baik dengan serapan anggaran sebesar Rp. 12.387.067.180 (84%) dari total anggaran sebesar Rp. 14.763.970.970. Sejumlah kendala yang ditemukan pada pelaksanaan program terkait kondisi pandemi covid-19 sepanjang tahun 2021 sebagai faktor penghambat pencapaian realiasi keuangan yang ditargetkan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada beberapa periode mengakibatkan terkendalanya progress program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama pelaksanaan program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Program ini diakomodir dana DAK Non fisik Bidang Keluarga Berencana yang terserap hanya sebesar 67 %. Program ini memuat pembinaan kader KB, layanan KB, maupun sosialisasi penyuluhan program KKBPK dan stunting kepada masyarakat kota Batam sepanjang tahun 2021. Sejumlah strategi telah diterapkan sehingga pencapaian indikator CPR sebesar 78.70 tercapai masih sesuai target tahun 2021 pada angka 74.0 sekalipun persentasenya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Sebesar 84.02.

Tabel 3.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Sasaran Strategis/IKU | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|--|-------------------|-----------|---------|-------------------|------------------|---------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga | | | | 10.182.382.080,00 | 9.151.562.565,00 | 89.87% |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94.54% | 94.43% | 99,88% | 8.127.653.080,00 | 7.500.057.565,00 | 92.27% |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 61.50 % | 59.10% | 96,09% | 918.680.000,00 | 851.364.000 | 92.67% |

| | | | | | | | |
|----|---|------|--------|---------|------------------|------------------|--------|
| | Persentase Perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan | 100% | 100% | 100% | 1.136.054.000,00 | 800.141.000,00 | 70,43% |
| 2. | Terkendalinya pertumbuhan penduduk | | | | 4.581.583.890,00 | 3.235.504.615,00 | 70,62% |
| | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) | 74% | 78.70% | 106,35% | 4.581.583.890,00 | 3.235.504.615,00 | 70,62% |

Tabel 3.2.1. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| Kode | Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Keuangan | | Persen (%) | Sisa Anggaran |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| | | Anggaran | Realisasi Januari s/d 31 Desember | Keuangan | |
| 2.08.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 7.740.067.280 | 7.119.007.765 | 92% | 621.059.515 |
| 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.797.509.720 | 6.252.593.574 | 92% | 544.916.146 |
| 2.08.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.711.229.720 | 6.179.513.574 | 92% | 531.716.146 |
| 2.08.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 86.280.000 | 73.080.000 | 85% | 13.200.000 |
| 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 136.576.000 | 116.568.500 | 85% | 20.007.500 |
| 2.08.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.998.500 | 29.781.500 | 99% | 217.000 |
| 2.08.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 40.229.500 | 33.739.000 | 84% | 6.490.500 |
| 2.08.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.780.000 | 21.780.000 | 100% | - |
| 2.08.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.365.000 | 11.215.000 | 99% | 150.000 |
| 2.08.01.2.06.09 | Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 33.203.000 | 20.053.000 | 60% | 13.150.000 |
| 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 110.200.000 | 101.130.000 | 92% | 9.070.000 |
| 2.08.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | 110.200.000 | 101.130.000 | 92% | 9.070.000 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | Lainnya | | | | |
| 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 598.613.360 | 584.858.191 | 98% | 13.755.169 |
| 2.08.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | 47.048.400 | 39.434.899 | 84% | 7.613.501 |
| 2.08.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.280.000 | 2.280.000 | 100% | - |
| 2.08.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 549.284.960 | 543.143.292 | 99% | 6.141.668 |
| 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 97.168.200 | 63.857.500 | 66% | 33.310.700 |
| 2.08.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 17.621.000 | 7.778.000 | 44% | 9.843.000 |
| 2.08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan | 62.077.200 | 38.609.500 | 62% | 23.467.700 |
| 2.08.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.470.000 | 17.470.000 | 100% | - |
| 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 918.680.000 | 851.364.000 | 93% | 67.316.000 |
| 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 918.680.000 | 851.364.000 | 93% | 67.316.000 |
| 2.08.04.2.01.03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 918.680.000 | 851.364.000 | 93% | 67.316.000 |
| 2.08.02 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 338.005.800 | 331.469.800 | 98% | 6.536.000 |
| 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.755.800 | 30.053.800 | 95% | 1.702.000 |
| 2.08.02.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.755.800 | 30.053.800 | 95% | 1.702.000 |
| 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 306.250.000 | 301.416.000 | 98% | 4.834.000 |
| 2.08.02.2.02.01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial | 306.250.000 | 301.416.000 | 98% | 4.834.000 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | dan Ekonomi | | | | |
| 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 49.580.000 | 49.580.000 | 100% | - |
| 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 49.580.000 | 49.580.000 | 100% | - |
| 2.08.05.2.01.02 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 49.580.000 | 49.580.000 | 100% | - |
| 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 444.678.000 | 312.341.000 | 70% | 132.337.000 |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 262.624.000 | 256.006.000 | 97% | 6.618.000 |
| 2.08.03.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 262.624.000 | 256.006.000 | 97% | 6.618.000 |
| 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 182.054.000 | 56.335.000 | 31% | 125.719.000 |
| 2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 182.054.000 | 56.335.000 | 31% | 125.719.000 |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 367.381.000 | 165.545.000 | 45% | 201.836.000 |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 52.180.000 | 52.180.000 | 100% | - |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 52.180.000 | 52.180.000 | 100% | - |
| 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 315.201.000 | 113.365.000 | 36% | 201.836.000 |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 315.201.000 | 113.365.000 | 36% | 201.836.000 |
| 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 323.995.000 | 322.255.000 | 99% | 1.740.000 |
| 2.08.06.2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 323.995.000 | 322.255.000 | 99% | 1.740.000 |
| 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 323.995.000 | 322.255.000 | 99% | 1.740.000 |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 3.809.080.390 | 2.741.258.715 | 72% | 1.067.821.675 |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.149.144.390 | 849.640.715 | 74% | 299.503.675 |
| 2.14.03.2.01.02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 102.613.390 | 48.042.305 | 47% | 54.571.085 |
| 2.14.03.2.01.03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | 173.747.000 | 159.621.300 | 92% | 14.125.700 |
| 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 872.784.000 | 641.977.110 | 74% | 230.806.890 |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Punyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 307.200.000 | 209.772.000 | 68% | 97.428.000 |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 307.200.000 | 209.772.000 | 68% | 97.428.000 |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1.752.064.000 | 1.287.212.000 | 73% | 464.852.000 |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 198.475.000 | 88.388.000 | 45% | 110.087.000 |
| 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 591.369.000 | 398.848.000 | 67% | 192.521.000 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 962.220.000 | 799.976.000 | 83% | 162.244.000 |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 600.672.000 | 394.634.000 | 66% | 206.038.000 |
| 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 600.672.000 | 394.634.000 | 66% | 206.038.000 |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 691.295.000 | 432.610.000 | 63% | 258.685.000 |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 691.295.000 | 432.610.000 | 63% | 258.685.000 |
| 2.14.04.2.01.03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 90.195.000 | 80.250.000 | 89% | 9.945.000 |
| 2.14.04.2.01.06 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 601.100.000 | 352.360.000 | 59% | 248.740.000 |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 81.208.500 | 61.635.900 | 76% | 19.572.600 |
| 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 81.208.500 | 61.635.900 | 76% | 19.572.600 |
| 2.14.02.2.01.02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 81.208.500 | 61.635.900 | 76% | 19.572.600 |
| TOTAL | | 14.763.970.970 | 12.387.067.180 | 84% | 2.376.903.790 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana dengan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun dari sisi keuangannya sehingga secara umum semua kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal dan memenuhi Rencana Capaian Kinerja (target) sesuai yang tertuang dalam 2 rencana strategis yang ingin dicapai. Kendatipun sepanjang tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan masih terdampak oleh kondisi pandemic covid-19 sehingga ditemui sejumlah kendala dan kekurangan akan tetapi hal tersebut masih bersifat wajar dan secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan.

“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban terhadap Penetapan Kinerja”

Dari seluruh Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis dalam program-program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil merealisasikannya. Dan diharapkan capaian ini akan terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang dan tetap proaktif merespons segala tantangan yang ada dalam upaya mewujudkan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera seperti yang tertuang dalam visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Sebagai akhir dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini, indikator ukuran dan pembuatannya dilaksanakan dengan tetap mengacu dan berpedoman pada aturan baku pembuatan LKjIP yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Batam.